

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan. Di satu pihak kondisi ini menguntungkan karena kehidupan sosial yang bersifat paguyuban dapat terus dikembangkan, namun di pihak lain, dalam kehidupan modern, masyarakat yang hidup di pedesaan seringkali dihadapkan pada persoalan benturan nilai-nilai, yakni antara nilai masyarakat pedesaan yang mereka junjung tinggi dengan masyarakat modern yang cenderung kapitalistik.

Kusnadi (2000:9) mengelompokkan kondisi masyarakat petani di pedesaan (di Indonesia), ke dalam tiga kelompok besar yaitu buruh tani yang tidak berlahan (tunalahan), petani di dataran tinggi, dan para nelayan subsisten. Semua kelompok tadi berada pada kondisi "serba kekurangan", dan kondisi tersebut menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat pedesaan, yakni kemiskinan, ketidakberdayaan, kualitas sumber daya manusia rendah, dan tingkat pendidikan rendah. Pada akhirnya, masalah-masalah tersebut, menjadi ciri yang menandai sebagian besar masyarakat pedesaan di Indonesia.

Sebenarnya, banyak keuntungan yang diperoleh jika pembangunan pertanian berhasil, diantaranya menciptakan peluang kerja di luar sektor pertanian dan penganekaragaman pekerjaan untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi masyarakat (Corner, 1988 dan Abdullah, et.al. 1995, dalam Kusnadi, 2000: 5-9).

Dari sisi lain, berbagai kajian kontemporer yang menyoroti masalah pembangunan masyarakat petani pedesaan (*Community Rural Development*) mengaitkan dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat terutama pada

rumah tangga (keluarga). Misalnya, Wong (1988, dalam Suwarsono dan Alvin, 2000: 60), meneliti perubahan sosial-ekonomi dari aspek nilai budaya keluarga etnis Cina (pemilik usaha) dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi di Hongkong. Hasil penelitiannya memberikan gambaran, bahwa pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan transformasi nilai budaya masyarakat itu sendiri, yakni berangkat dari keluarga. Bahkan, pranata keluarga tradisional justru akan mampu membantu etos ekonomi dinamis dengan apa yang disebut sebagai "etos usaha keluarga". Dengan demikian dapat dipahami bahwa etos usaha keluarga dapat ditanamkan dan dikembangkan melalui proses transformasi budaya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Keterlibatan penduduk selaku sumber daya manusia dalam pembangunan, tidak dapat dipisahkan dari proses transformasi budaya dalam arti pendidikan yang berkaitan erat dengan perubahan sosial, pranata sosial, dan pertumbuhan ekonomi. David C. Korten (1990, dalam Tjahya Supriatna, 1997: 78) menegaskan bahwa transformasi budaya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup, pengembangan institusi sosial yang demokratis, pemanfaatan teknologi serta pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan.

Perubahan sosial erat kaitannya dengan sistem sosial, budaya, dan kepribadian, termasuk di dalam subsistem budaya, menurut Everet M. Rogers dan Floyd Shoemaker (1971) dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal berupa difusi, inovasi, adopsi, dan konsekuensi. Dalam arti pengembangan pengaruh sistem budaya, sistem sosial, dan sistem kepribadian yang unggul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Sudardja Adiwikarta (1988, dalam Tjahya Supriatna, 1997:78), menandakan bahwa proses transformasi pendidikan bertubungan erat dengan pranata sosial, kehidupan ekonomi, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial.

Dari ketiga pandangan tersebut, sesungguhnya transformasi nilai-nilai budaya masyarakat (keluarga) Indonesia yang beragam perlu dipertimbangkan dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Dengan kata lain, dalam konteks pemberdayaan masyarakat terutama peningkatan pendapatan petani sesungguhnya dapat dimulai dan ditumbuhkan-kembangkan melalui pendidikan/pelatihan dalam keluarga (rumah tangga). Keluarga dalam hal ini, dapat dipandang sebagai unit dasar komposisi ekonomi, yang memberikan landasan untuk terjadinya proses inovasi, kemantapan, dan pengambilan resiko.

Pendekatan pendidikan menurut teori *human capital* dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Shultz (1981) memandang modal manusia (*human capital*) dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada pendekatan pembangunan sumber daya manusia sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Hasil penelitian Gary Field, menunjukkan signifikansi bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Gary Field 1980, dalam Sudjana, 2001:256). Oleh karena itu, peningkatan sosial-ekonomi melalui pendekatan pendidikan merupakan salah satu fokus utama pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan masyarakat di pedesaan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian UNESCO 1975 (Langgulang, 1998: 89) yang menyatakan bahwa semakin tersebar pendidikan di suatu negara, semakin cepat pertumbuhan (ekonomi) negara itu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan merupakan upaya penting dalam kaitannya dengan lapangan kerja di luar sektor pertanian untuk memperoleh tambahan pendapatan (*incomes generation*) tanpa mengabaikan budaya masyarakat

lokal dan memanfaatkan potensi unggulan SDA dan SDM lokal dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

Frank Ellis (1998; dan 2000) mengemukakan bahwa ada lima faktor determinan sebagai alasan petani di negara-negara berkembang (kasus di Afrika) berpendapatan rendah, melakukan diversifikasi pendapatan, yaitu: musim, strategi resiko, pasar kerja, kegagalan pasar kredit, dan strategi aset serta penyesuaian diri dan adaptasi. Berbeda dengan Tom Reardon (1999) dalam kajiannya, ia lebih menekankan dan menawarkan solusi berupa pilihan-pilihan bagi keluarga-keluarga (petani) di pedesaan memperoleh sumber pendapatan di luar sektor pertanian (*rural nonfarm income*) untuk negara-negara berkembang. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lapangan kerja non pertanian di pedesaan dipengaruhi dua motivasi, yaitu: kesulitan sebagai faktor pendorong (*distress-push factor*) dan permintaan sebagai faktor penarik (*demand-pull factor*). Pertama, kesulitan sebagai faktor pendorong disebabkan tak memadainya pendapatan dalam sektor pertanian mendorong para pekerja memasuki sektor pekerjaan non pertanian yang bayarnya murah. Dan kedua, permintaan sebagai faktor penarik disebabkan para pekerja pertanian mampu meningkatkan peluang kerja yang lebih memberikan pendapatan yang menarik di sektor non-pertanian.

Berdasarkan dua pandangan yang dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan atau penghasilan bagi rumah tangga petani (petani tuna lahan, petani lahan sempit, dan buruh tani) dapat didiversifikasikan untuk aktivitas-aktivitas ekonomi rumah tangga di pedesaan (*diversity in rural incomes*) di luar sektor pertanian (*non-farm sector*), antara lain, seperti industri rumah tangga, transportasi, dan/atau jasa.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kehidupan keluarga petani dan nelayan melalui peningkatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan tersebut dikembangkan melalui program-program yang berbasis sumber daya, kelembaga-

an, dan budaya lokal, termasuk perhatian terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha pertanian dan pelaku usaha skala kecil lainnya. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan atau penghasilan keluarga di pedesaan, yang sebagian besar terdiri dari petani sesungguhnya dapat didiversifikasikan pada aktivitas-aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian (*nonfarm sector*) yang berskala kecil.

Perolehan pendapatan (*incomes generation*) dari lapangan kerja non-pertanian (*nonfarm sector*) bagi rumah tangga atau masyarakat petani yang berpenghasilan rendah, merupakan salah satu strategi adaptasi untuk kelangsungan mata pencaharian, menurut Frank Ellis (1999) sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama berkaitan dengan dukungan politik dalam berbagai kebijakan program pembangunan masyarakat pedesaan (pemerintah) dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan ke arah diversifikasi pendapatan selain dari sektor pertanian di pedesaan. Pandangan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan di negara-negara sedang berkembang, yang menyimpulkan:

(1) Pendidikan memperbaiki akses pada lapangan kerja non-pertanian pedesaan, (2) Berfungsinya infrastruktur merupakan kunci peningkatan lapangan kerja non-pertanian pedesaan dan pendapatan, karena berkurangnya ongkos transaksi untuk industri skala kecil, *agribisnis* dan lain-lain, (3) Lingkungan kebijakan ekonomi yang liberal merupakan pra-kondisi untuk mendorong lapangan kerja non-pertanian pedesaan, (4) Pasar uang pedesaan diperlukan untuk meningkatkan lapangan kerja non-pertanian pedesaan dan industri berskala kecil, dan (5) Dukungan lewat layanan bisnis memperkuat basis untuk lapangan kerja non-pertanian pedesaan dan industri berskala kecil (Frank Ellis, 1999: 6-7).

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan di atas, sejalan dengan hasil penelitian dengan studi kasus di beberapa Negara Berkembang di Afrika maupun di Asia menunjukkan arti penting lapangan kerja di luar sektor pertanian (*nonfarm sector*) di pedesaan untuk: pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan

pedesaan dan peningkatan potensi keberlangsungan sumber daya alam, jender, keamanan pangan, dan pencegahan urbanisasi yang cepat atau besar-besaran. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa lapangan kerja non-pertanian di pedesaan (*the rural nonfarm/RNF*) terkait dengan lapangan kerja, pendapatan dan mata pencaharian yang tidak secara langsung bersumber pada produksi pertanian dan peternakan (Aan Gordon, 1999; Peter Lanjouw, 1999; 2001; Wold Bank, 2000; Tom Reardon, 1999). Dari beberapa hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap masalah sosial dan ekonomi yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat dapat memusatkan perhatian pada keluarga, khususnya terhadap perluasan lapangan kerja di luar sektor pertanian (*nonfarm sector*) dan penganekaragaman pendapatan bagi keluarga petani di pedesaan.

Masyarakat pedesaan (rumah tangga petani tuna lahan dan buruh tani serta petani berlahan sempit) sering diidentikkan dengan ketidakberdayaan, sehingga hampir semua anggota keluarga terlibat dalam proses produksi termasuk kaum perempuannya. Di kalangan masyarakat bawah (petani), faktor ekonomi merupakan alasan yang dikemukakan, dimana peranan perempuan turut serta mencari nafkah untuk rumah tangga (keluarganya). Kondisi ini semakin diperparah oleh sulitnya mencari lapangan kerja lain (sektor formal) bagi para petani.

Untuk menyikapi tekanan sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dihadapinya, kelompok rumah tangga petani misalnya, antara lain, mengembangkan strategi adaptasi. Strategi adaptasi yang lazim dilakukan adalah memobilisasi peranan perempuan (istri) dan anak-anak untuk mencari nafkah, sementara suami melakukan diversifikasi pekerjaan untuk memperluas sumber-sumber penghasilan atau pendapatan.

Secara umum para ahli menegaskan bahwa kunci utama pembangunan adalah pendidikan. Pernyataan ini dapat kita hubungkan dengan pandangan para ahli

pendidikan dan pembangunan, salah satunya Irwin T. Sanders (dalam Sudjana: 2000: 167) yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat merupakan perpaduan antara pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dengan pengembangan ekonomi (*economic development*). Pengorganisasian masyarakat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, mobilisasi sumber, paguyuban dan tata kehidupan sosial. Sedangkan pengembangan ekonomi adalah upaya yang dilakukan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat. Proses pengorganisasian masyarakat dan pengembangan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui program pendidikan luar sekolah yang secara umum, antara lain bertujuan:

(1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, dan (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Pasal 2).

Pembelajaran keterampilan dengan dukungan agen perubahan (*agent of change*) serta pengembangan teknologi partisipatif diharapkan mampu memberdayakan masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal serta pengetahuan masyarakat lokal (*endogenous knowledge*) adalah penting dalam sistem mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rumah tangga petani miskin desa pesisir memerlukan penanganan secara terpadu (*integrated*) dari berbagai pihak, baik pemerintah (institusi publik) maupun swasta (institusi privat) melalui pengembangan pendekatan partisipatif berbasis sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Bertitik tolak dari uraian di atas, upaya pengembangan model pelatihan keterampilan bagi masyarakat di pedesaan menjadi penting, karena memberikan peluang



lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian (*nonfarm sector*) di pedesaan sebagai mata pencaharian alternatif untuk memperoleh keragaman pendapatan (*incomes diversity*) di desa. Dalam konteks pendidikan bagi orang dewasa, pelatihan sebagai upaya untuk memaksimalkan pembelajaran. Orang dewasa akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan manakala program yang ditawarkan terkait dengan kebutuhan yang ia harapkan dalam upaya memecahkan masalah (*gap*) antara keadaan saat ini dan harapan yang diinginkan (Knowles, 1977: 91-109). Menurut Mayo dan DuBois (1987: 24-27), pelatihan keterampilan harus dirancang secara cermat berdasarkan kebutuhan calon peserta pelatihan (keluarga petani) dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu :

- (1) pengetahuan dan keterampilan (*skill*) yang akan diberikan harus dalam jangkauan dan kapabilitas peserta;
- (2) materi harus diorganisir secara hati-hati;
- (3) tujuan, kandungan materi serta evaluasi harus merupakan satu kesatuan;
- (4) dirancang secara sistematis; dan
- (5) apa yang akan dipelajari bermanfaat bagi peserta pelatihan.

Merancang program pelatihan berbagai jenis keterampilan berarti memberikan peluang dan sekaligus menawarkan berbagai pilihan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga petani memungkinkan terjadinya diversifikasi sistem usaha dan mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan di pedesaan. Hal ini merupakan salah satu cara membantu mereka yang selalu menghadapi masalah kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari serta usaha meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga petani miskin di pedesaan.

Kabupaten Pontianak sebagai salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 8.262,10 km² dan 14 Kecamatan. Pada tahun 2003 jumlah penduduknya 691.920 jiwa. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pontianak, Susenas 2003 dari jumlah penduduk 691.920 jiwa tersebut terdapat 77.841 jiwa (11,25 %) tergolong miskin. dan 55.986 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 1.823

KK termasuk kategori keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS) yang terdiri dari 1.165 KK karena alasan ekonomi dan 658 KK bukan alasan ekonomi. Yang termasuk Keluarga Sejahtera I (KS1) berjumlah 54.163 KK dan terdiri dari 32.575 KK karena alasan ekonomi dan 21.588 KK bukan alasan ekonomi. Dilihat dari tipologi masyarakatnya, wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengentasan kemiskinan adalah: (1) Wilayah Perkotaan/Pinggiran Kota; (2) Wilayah Pesisir Pantai; (3) Wilayah Pedalaman; dan (4) Wilayah Pesisir Sungai (Randuk Taskin Kabupaten Pontianak, 2000-2015; 2000: 4-9).

Sebaran Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada setiap tipe wilayah di tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pra Keluarga Sejahtera dan Sejahtera I
Berdasarkan Topologi Wilayah di Kabupaten Pontianak

No	Tipe Wilayah	Kecamatan	Sasaran		Jumlah
			PKS	KS I	
I	Perkotaan/Pinggiran Kota	1. Mempawah Hilir	64	2.650	2.714
		2. Sungai Pinyuh	646	3.555	4.201
		3. Sungai Raya	0	8.581	8.581
		4. Siantan	217	4.891	5.108
II	Pesisir Pantai	1. Sungai Kunyit	25	1.893	1.918
		2. Sungai Kakap*)	43	8.280	8.323
		3. Teluk Pakedai	29	1.145	1.174
		4. Batu Ampar	223	7.471	7.694
III	Pesisir Sungai	1. Sungai Ambawang	57	5.985	6.042
		2. Terentang	148	1.421	1.569
		3. Kubu	163	4.252	4.415
		4. Kuala Mandor B	16	2.479	2.495
IV	Pedalaman	1. Toho	156	1.560	1.716

Sumber : BKKBN Kab. Pontianak Tahun 2001

*) Pada tahun 2002 kecamatan ini dibagi menjadi dua, yakni Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Rasau Jaya.

Dari data di atas tampak bahwa jumlah keluarga miskin sebagian besar penduduknya bermukim: (1) di kecamatan wilayah perkotaan/pinggiran kota, yaitu Ke-



kecamatan Sungai Pinyuh, dan Siantan; (2) di kecamatan wilayah pesisir pantai, yaitu Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap; (3) di wilayah pesisir sungai, yaitu Kecamatan Terentang dan Kubu; dan (4) di wilayah pedalaman, yaitu Kecamatan Toho.

Dilihat dari pendapatan masyarakat, rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Pontianak pada tahun 2001 sebesar Rp.2.463.456,18/tahun per kapiata, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,94%/tahun (Bappeda Kab. Pontianak, 2002:13). Hal ini menggambarkan rendahnya pendapatan masyarakat yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian petani. Kondisi semacam ini membutuhkan intervensi pendidikan, terutama pendidikan luar sekolah melalui program pemberdayaan yang menyentuh pada persoalan yang esensial yaitu: program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang terkait dengan mata pencaharian dan pendapatan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan bagi keluarga (rumah tangga) petani di luar sektor pertanian, baik secara individu maupun kelompok.

Pemberdayaan keluarga petani berpenghasilan rendah melalui pendidikan keterampilan diharapkan agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta aspirasi ke arah kemadirian dan produktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupannya. Program pelatihan tersebut lebih menekankan pada penguasaan berbagai jenis keterampilan untuk memperoleh pendapatan tambahan bagi rumah tangga petani di luar sektor pertanian di pedesaan.

Penelitian ini menyajikan sebuah model pelatihan keterampilan terpadu. Melalui model ini diharapkan memberikan penyadaran akan eksistensi diri warga belajar (peserta pelatihan) dan akibat proses belajarnya (keluarga petani), dapat memperbaiki dan meningkatkan perolehan pendapatan (*incomes generation*), terutama bagi keluarga petani desa pesisir di Kabupaten Pontianak, kiranya layak untuk dikaji. Ada beberapa alasan mengapa upaya peningkatan pendapatan keluarga petani penting dilakukan me-

lalui pemberian keterampilan terpadu. Pertama, masyarakat atau keluarga petani (tuna lahan, lahan sempit, dan buruh tani) di pedesaan, khususnya di desa pesisir, merupakan anggota masyarakat yang kurang beruntung, karena tingkat pendidikan, keterampilan dan sikap serta aspirasi yang relatif rendah sehingga perlu diberdayakan dalam memanfaatkan dan mengolah hasil pertanian yang berorientasi pada perolehan nilai tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Kedua, upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal dalam upaya memberdayakan masyarakat (keluarga) di desa pesisir melalui program pelatihan keterampilan terpadu, diharapkan dapat membantu ke arah meningkatkan keragaman (*diversity*) mata pencaharian dan pendapatan keluarga berskala mikro. Dari sisi itulah yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam upaya pemberdayaan mereka.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan peran dan mobilisasi anggota keluarga, termasuk perempuan (istri), anak dan suami, baik keluarga nelayan dan/atau petani, maka pemberdayaan mereka melalui peningkatan keterampilan yang selaras dengan latar belakang sosial budayanya sebagai salah satu alternatif, sehingga dapat meningkatkan peran dalam kehidupan dan pembangunan melalui peningkatan keterampilan yang bersifat produktif melalui pendekatan partisipatif. Sebagaimana yang direkomendasi oleh UNESCO bahwa memasuki abad XXI program pembelajaran yang diberikan hendaknya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga mau dan mampu belajar (*learning to know or learning to learn*). Bahan belajar yang dipilih hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternatif kepada peserta didiknya (*learning to do*), dan mampu memberikan motivasi untuk hidup dalam era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan (*learning to be*). Pembelajaran tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk keterampilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga

keterampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan hidup dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dengan semangat kesamaan dan kesejajaran (*leaning to life together*) (Delors, 1996: 86; Depdiknas, 2002: 3).

Keempat, upaya mengimplementasikan semangat pemberdayaan masyarakat menurut Pendekatan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Masyarakat atau, *Community Base Education (CBE)*. *CBE* adalah desentralisasi dalam manajemen pendidikan atau untuk, oleh dan dari masyarakat, serta nilai-nilai tradisional harus dilestarikan dan dimanfaatkan dalam implementasi (Depdikbud, 1999:18). Konsep tersebut mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan baik untuk diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosial budayanya.

Kelima, pengembangan model pelatihan keterampilan bagi masyarakat telah banyak dilakukan, tetapi model pelatihan keterampilan terpadu dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan berbagai pihak untuk diversifikasi pendapatan masyarakat pedesaan berskala rumah tangga belum memperoleh perhatian melalui kajian dalam penelitian, khususnya terhadap keluarga petani miskin di desa pesisir.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kajian terhadap masalah ini dirasa cukup strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pengembangan model pelatihan keterampilan terpadu untuk diversifikasi pendapatan petani berskala rumah tangga. Pembelajaran/pelatihan diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan menuju keanekaragaman pendapatan melalui diversifikasi sistem mata pecaharian berskala rumah tangga bagi masyarakat pedesaan, khususnya keluarga di desa pesisir (pantai). Yang menjadi perhatian utama dalam kajian ini adalah pemberdayaan keluarga petani yang tergolong Pra Keluarga Sejahtera (PKS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) yang bermukim di desa pesisir Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Dalam era otonomi daerah, pembangunan dititikberatkan pada prakarsa dan partisipasi masyarakat. Titik berat pembangunan yang demikian didasarkan atas pengalaman pembangunan di negara-negara berkembang yang perencanaan pembangunan dari atas (*top down*), ternyata lebih banyak menghasilkan kegagalan ketimbang keberhasilan (Syahrir, 1987). Berangkat dari pengalaman seperti itu, maka para ahli kebijakan pembangunan khususnya untuk negara berkembang mengubah strategi pembangunan yang didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki potensi dan tidak bodoh, mereka punya prakarsa, dan apabila distimulasi mereka mampu mengembangkan dirinya sendiri. Asumsi ini sesungguhnya sejalan dengan *konstruktivisme*. Jika masyarakat dipandang sebagai pembelajar, maka dalam perspektif *konstruktivisme* seperti yang dijelaskan oleh Driver dan Bell (dalam Reece dan Walker, 1997:111) bahwa mereka bukan pasif, tapi aktif dan keberhasilannya tergantung pada sejauhmana mereka diberi tanggung jawab atas belajarnya sendiri.

Orang dewasa pada dasarnya memiliki konsep diri dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri serta ingin memperoleh pengakuan dari orang lain sebagai seseorang yang memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri (*self directed*). Pembelajaran orang dewasa (keluarga petani) didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan dirinya agar mereka mampu secara efektif mengatasi masalah-masalah kehidupan nyata di masyarakat melalui tugas-tugas untuk memecahkan masalah. Bagi orang dewasa, pengalaman itu merupakan sumber belajar bagi dirinya dan orang lain. Dalam perspektif *konstruktivisme*, proses perubahan bagi pembelajaran orang dewasa, sesungguhnya akan bermakna bilamana didasarkan dari pengalaman dan kebutuhan orang dewasa itu sendiri.

Konsepsi seperti yang dikemukakan di atas, sesungguhnya mirip dengan konsep pemberdayaan (*empowering*), yang menekankan pada kemampuan mengembangkan diri sendiri pada masyarakat (Adimihardja, 2001:2). Dengan demikian, dalam proses pemberdayaan, kehadiran agen perubahan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat (petani di pedesaan) dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar mengatasi berbagai masalah kehidupannya.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh petani di pedesaan (petani lahan sempit, tuna lahan, dan buruh tani) adalah masalah kesulitan ekonomi akibat rendahnya tingkat pendapatan, di samping masalah sosial lainnya (misalnya, buta huruf atau tingkat pendidikan relatif rendah, tidak mampu menyekolahkan anak-anak, terbatasnya memasuki lapangan pekerjaan di sektor formal di pedesaan, dan lain-lain). Kondisi seperti ini muncul tidak terlepas dengan sumber pendapatan (penghasilan) dan lapangan kerja (mata pencaharian).

Bagi keluarga (rumah tangga) petani di pedesaan, pilihan rasional dan kontekstual yang bisa dikembangkan untuk kepentingan jangka panjang adalah melakukan diversifikasi pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan di kalangan keluarga petani serta anggota-anggota rumah tangganya, terutama di sektor non-pertanian. Dengan melakukan diversifikasi pekerjaan diharapkan sumber-sumber pendapatan petani semakin beragam dan akses ke sumber daya ekonomi akan lebih luas serta fleksibel.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan, khususnya keluarga petani di desa pesisir, memerlukan penanganan secara "*holistic*" melalui intervensi pendidikan dengan pendekatan partisipatif. Pelibatan berbagai *institusi publik* dan *institusi privat*, lembaga atau organisasi kemasyarakatan bersama masyarakat (sebagai warga belajar), sangat memungkinkan terjadinya proses partisipasi warga belajar. Stringer (1996: 10) menunjuk adanya beberapa keuntungan atas program yang

partisipatif, yaitu mengembangkan demokratisasi, kesamaan derajat, kebebasan, dan peningkatan. Upaya penciptaan suasana belajar yang lebih baik dan lebih efektif oleh Knowles (1984: 122) diharapkan adanya pelibatan warga belajar dalam perencanaan bersama (*mutual planning*).

Pada umumnya kegiatan produktif masyarakat desa pesisir, terutama petani di sepanjang pesisir utara di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat sebagian besar penduduknya masih tergantung pada satu sumber mata pencaharian di sektor pertanian dengan sistem tadah hujan (ladang atau huma) yang tingkat produktivitas masih sangat rendah (1,7-2,3 ton/Ha) jika dibandingkan dengan produksi pertanian di Pulau Jawa dengan sistem pengairan (sawah) yang bisa mencapai antara 5-6 ton/Ha. Sementara kegiatan mikro-ekonomi yang ada di Kabupaten Pontianak belum memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal, kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan, serta etos usaha keluarga masih rendah sehingga belum mendukung upaya perbaikan dan peningkatan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka sendiri.

Dilihat dari pendapatan masyarakat, rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pontianak pada tahun 2001 sebesar Rp. 2.463.456,18/tahun, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,94 %/tahun (Bappeda Kab. Pontianak, 2002: 13), menggambarkan rendahnya tingkat pendapatan penduduknya yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian petani. Kondisi semacam ini membutuhkan intervensi pendidikan luar sekolah melalui program pemberdayaan yang menyentuh pada persoalan yang esensial yaitu: program pendidikan yang terkait dengan mata pencaharian dan pendapatan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan bagi keluarga (rumah tangga) petani di luar sektor pertanian di pedesaan baik secara individu maupun kelompok, yaitu pelatihan keterampilan terpadu.

2. Fokus Penelitian

Menurut *The Action Cultural Popular (ACPO)* bahwa masalah pokok dari keterbelakangan bukanlah kurangnya bahan baku, melainkan ketidakmampuan penduduk desa untuk mengatasi keterbelakangan mereka dan menghilangkan rintangan-rintangan budaya seperti sikap-sikap tradisional, pasrah nasib dan ketergantungan, baik secara individual maupun kolektif. Perangkat ini harus dibuka oleh kondisi-kondisi eksternal yang melingkupinya (Ahmed dan Coombs, 1977: 4).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah: Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan model pelatihan keterampilan terpadu untuk meningkatkan dan mendiversifikasikan sumber pendapatan rumah tangga petani desa pesisir di Kabupaten Pontianak.

Permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini meliputi: pertama, menemukenali kondisi obyektif masalah sosial dan ekonomi keluarga (rumah tangga) petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak. Kondisi sosial keluarga atau rumah tangga tersebut, antara lain meliputi: tingkat pendidikan, upaya pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari, pendidikan bagi anak-anak, kesehatan dan jaringan sosial. Sedangkan kondisi ekonomi, meliputi mata pencaharian dan tingkat perolehan pendapatan.

Kedua, penelitian ini berupaya menemukenali masalah yang berkenaan dengan program pelatihan keterampilan yang pernah dilaksanakan oleh pihak pemerintah sebagai institusi publik, terutama terkait dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Pontianak, antara lain meliputi: langkah-langkah perencanaan program, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta dampak program pelatihan bagi masyarakat sebagai peserta pelatihan terhadap perbaikan dan peningkatan ekonomi atau pendapatan mereka.

Ketiga, penelitian ini berupaya mengungkap dan merumuskan rancangan model konseptual pelatihan keterampilan terpadu bertolak dari kebutuhan nyata keluarga atau rumah tangga petani untuk memperbaiki dan meningkatkan perolehan pendapatan tambahan di luar sektor pertanian dilakukan langkah-langkah, antara lain: penyusunan perencanaan program pelatihan, merumuskan tujuan, materi dan sumber belajar, bahan dan peralatan/sarana, metode pelatihan, monitoring dan evaluasi program pelatihan.

Keempat, penelitian ini berupaya menguji validitas model konseptual pelatihan keterampilan terpadu sebelum diimplementasikan terhadap kelompok sasaran sebagai peserta pelatihan. Validasi model dilakukan untuk melihat kelayakan model konseptual pelatihan untuk diterapkan pada kelompok sasaran.

Kelima, penelitian ini akan mengaplikasikan model pelatihan keterampilan terpadu dalam proses pembelajaran jenis-jenis keterampilan dengan melibatkan berbagai pihak sebagai sumber belajar (instruktur/fasilitator).

Keenam, berkenaan dengan keberhasilan model pelatihan keterampilan terpadu dengan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan pelatihan, baik dari aspek penguasaan materi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta aspirasi) oleh peserta pelatihan, dan aspek dampak hasil pelatihan (*out-come*).

Permasalahan pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas, akan dijawab melalui studi eksplorasi dengan pendekatan kualitatif yang oleh Lincoln dan Guba (1995) disebut *inquiry naturalistic*. Secara umum Mc. Millan dan Schumacher (2001) mengatakan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa realitas merupakan sesuatu yang bersifat ganda, saling berinteraksi serta di dalamnya terjadi saling bertukarnya pengalaman-pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.

Hasil studi eksploratif selanjutnya menjawab permasalahan keempat, yaitu memvalidasi model konseptual pelatihan/pembelajaran keterampilan sebagai model sementara oleh para ahli dan praktisi. Model konseptual yang telah dirumuskan dan direvisi akan dilakukan diuji coba terbatas untuk mengetahui kelayakan model tersebut dengan menggunakan metode *quasi-experiment*. Langkah berikut mengimplementasikan model pelatihan sampai tahap diseminasi model. Salah satu bentuk diseminasi model yang akan dilakukan adalah diskusi dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam program pelatihan. Dengan demikian, secara metodologis, prosedur penelitian ini menggunakan rancangan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Karena itu, fokus permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, sejalan dengan pandangan Chambers (1988: 261) yang mengemukakan bahwa (1) model pembangunan yang berwawasan profesional yang sempit menjadi luas, (2) pembalikan arah proses belajar mengajar yang memungkinkan orang pusat belajar dari orang daerah, dan (3) pembalikan arus informasi dalam lembaga, organisasi, atau instansi sehingga yang di atas belajar dari bawah.

C. Rumusan Masalah

Upaya memberdayakan masyarakat di pedesaan dalam lingkup rumah tangga petani melalui pelatihan/pembelajaran keterampilan tujuan akhirnya adalah bukan hanya perolehan pengetahuan, keterampilan, tetapi kemampuan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan memecahkan masalah bersama dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Berangkat dari latar belakang dan fokus masalah yang diuraikan di atas permasalahan penelitian ini secara umum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana model pelatihan keterampilan terpadu untuk meningkatkan dan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat pedesaan ?

Dari permasalahan umum tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai sub-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak?
2. Bagaimana model pelatihan keterampilan yang pernah diterapkan dalam memberdayakan masyarakat atau keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak?
3. Bagaimana mengkonseptualisasikan model pelatihan keterampilan terpadu untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak ?
4. Bagaimana memvalidasi konseptual model pelatihan keterampilan terpadu untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak ?
5. Bagaimana mengaplikasikan model pelatihan keterampilan terpadu dalam proses pembelajaran keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak ?
6. Bagaimana mengevaluasi model pelatihan keterampilan terpadu dalam mendiversifikasikan sumber pendapatan keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan model pelatihan keterampilan terpadu untuk diversifikasi pendapatan keluarga petani yang relevan sehingga dapat diimplementasikan dalam kondisi kehidupan sosial-budaya keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisisosial dan ekonomi keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak.
2. Model pelatihan keterampilan yang pernah diterapkan dalam memberdayakan masyarakat atau keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak.

3. Konsep model pelatihan keterampilan terpadu yang sesuai untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak.
4. Validitas model konseptual pelatihan keterampilan terpadu untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak.
5. Aplikasi model pelatihan keterampilan terpadu dalam proses pembelajaran keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak.
6. Efektifitas model pelatihan keterampilan terpadu dalam mendiversifikasikan sumber pendapatan keluarga petani di desa pesisir Kabupaten Pontianak.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan memiliki kegunaan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis dalam bidang pendidikan luar sekolah, khususnya berkenaan dengan pelatihan keterampilan terpadu bagi masyarakat petani di pedesaan.

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa proposisi atau dalil dalam bidang pengembangan model pelatihan keterampilan terpadu yang dapat memperkaya model pengelolaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya program pemberdayaan masyarakat dalam dimensi pendidikan luar sekolah. Hal ini terkait dengan pendidikan mata pencaharian dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Dari segi praktis, kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam perencanaan program pembangunan ekonomi berbasis rakyat dan pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan melalui program pelatihan keterampilan untuk memperbaiki dan meningkatkan perolehan pendapatan masyarakat petani di desa pesisir.
2. Memberikan masukan bagi lembaga-lembaga penyelenggara program pemberdayaan masyarakat, baik yang diselenggarakan dalam sistem pendidikan formal maupun



nonformal, termasuk program PLS yang berkaitan dengan program mata pencaharian.

3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi salah satu persoalan bangsa Indonesia yang sedang dihadapi.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan perlu dikemukakan definisi operasionalnya untuk dijadikan pegangan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pengembangan, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang terencana dan terarah agar sesuatu lebih maju/semesta untuk menghasilkan suatu model agar proses atau hasil kegiatan agar lebih baik dari sebelumnya.
2. Model, diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu (M. Ishak, 2000:1). Dalam penelitian ini, model dimaksudkan sebagai abstraksi mengenai aspek-aspek masalah yang terpilih yang disusun sebagai acuan/pola kegiatan dan prosedur yang relatif tetap untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi pengembangan model adalah upaya mengembangkan suatu acuan/pola kegiatan yang terencana untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maju/meningkat dari sebelumnya, baik kuantitas maupun kualitas.
3. Pelatihan adalah pembelajaran pengembangan individual yang bersifat mendesak karena kebutuhan sekarang ini (Nadler, 1982: 6). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelatihan adalah proses kegiatan pembelajaran bagi peserta (warga belajar) untuk mengembangkan pola perilaku mereka dalam

bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap serta aspirasi untuk mencapai standar kehidupan yang diharapkan.

4. Keterampilan terpadu. Keterampilan secara umum diartikan sebagai kecekatan, kecakapan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan cermat dan teliti. Menurut Legge (1970), keterampilan berarti kemampuan mengkoordinasikan pikiran dan tenaga dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Legge dalam Sundoyo Pitono, 1990: 12-13). Terpadu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah memadukan berbagai aspek dalam kegiatan untuk tujuan tertentu, mulai dari perencanaan program, implementasi sampai evaluasi dan monitoring, termasuk pendampingan. Dalam penelitian ini, terpadu dipandang dari aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Sistem, dalam arti memadukan beberapa program dan jenis-jenis keterampilan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, antara lain: dari pihak pemerintah daerah melalui dinas/instansi teknis terkait (inststitusi publik), institusi privat (wirausahawan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sumber belajar lokal dan anggota masyarakat (keluarga) sebagai kelompok sasaran program.
 - b. Proses, pelatihan keterampilan terpadu adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan yang melibatkan berbagai pihak berdasarkan kebutuhan masyarakat (keluarga petani), disusun dan disepakati bersama.
 - c. Pendekatan, pelatihan keterampilan terpadu mengandung arti bahwa kegiatan pelatihan ditandai munculnya penguatan dan sistem kerja sama dari berbagai pihak atau komponen masyarakat, secara kelembagaan (pemerintah dan masyarakat), maupun kelompok masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat melalui pendekatan partisipatif.

- d. Materi, pelatihan keterampilan terpadu terdiri atas materi-materi dari setiap jenis keterampilan yang dipadukan dan dikemas dalam bentuk paket pembelajaran (berupa modul) yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan sumber daya serta budaya masyarakat. Materi pembelajaran lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil berskala rumah tangga yang berorientasi ke arah memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
 - e. Metode, mengandung arti bahwa dalam proses pembelajaran jenis-jenis keterampilan dilakukan dengan cara memadukan metode pembelajaran yang bersifat teoretis (teori) dan praktek dengan proporsi 30 % teori dan 70 % praktek. Jadi, keterampilan terpadu dalam penelitian ini adalah kecekatan dan kemampuan dalam melakukan berbagai kegiatan dengan cermat dan teliti, baik secara perseorangan maupun kelompok melalui sistem terpadu dengan pendekatan partisipatif.
5. Diversifikasi pendapatan adalah upaya memberikan peluang pilihan sumber-sumber pendapatan di luar sumber mata pencaharian utama. Agar perolehan pendapatan bertambah.
 6. Keterampilan di sektor nonpertanian di pedesaan adalah upaya memberikan peluang pilihan berbagai jenis keterampilan untuk melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan mendesak sehingga memungkinkan terjadinya diversifikasi sistem usaha dan mata pencaharian bagi setiap keluarga atau kelompok masyarakat untuk memperoleh pendapatan (*incomes generation*) di pedesaan. Pelatihan keterampilan menganekaragamkan sumber pendapatan (*incomes diversity*) dalam penelitian ini, terdiri dari dua bentuk kegiatan, yakni: Pertama, upaya membelajarkan peserta (anggota rumah tangga petani) dengan

sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diorientasikan pada nilai tambah ekonomis selain bertani untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari produk yang dihasilkan. Materi pelatihan yang perlu dikuasai atau dimiliki peserta pelatihan berupa pengetahuan dan keterampilan, antara lain tentang: (1) Pasar dan pemasaran, (2) Permodalan, (3) Kewirausahaan, (4) Bahan Tambahan Makanan/BTM dan Kesehatan, (5) Analisis Usaha dan Pembukuan Sederhana, (6) Produksi (*processing*), serta (7) Pengemasan (*packaging*) dan Pelabelan (*labelling*) dan kedua, upaya membelajarkan sejumlah jenis keterampilan mengedepankan kesesuaian kebutuhan peserta dan potensi sumber daya lokal sebagai pilihan selain mata pencaharian bertani untuk memperoleh dan/atau meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga petani.

7. Pembelajaran. Istilah “pembelajaran” (Coombs dan Ahmad, 1984) mengacu pada pendapat bahwa pendidikan adalah semua usaha yang dilakukan seseorang. Pembelajaran adalah cara, baik disengaja atau tidak oleh seseorang yang mengacu pada bagaimana melakukan dan mengembangkan cara-cara pembelajaran sehingga produk dari pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri.
8. Pemberdayaan, dalam penelitian ini pemberdayaan petani dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan anggota kelompok (rumah tangga) petani dan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup bagi diri dan atau rumah tangganya. Pemberdayaan masyarakat (rumah tangga petani) ditandai munculnya kesadaran, kemauan, kemampuan, dan sikap positif serta aspirasi dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program pelatihan/pembelajaran untuk memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, baik dilakukan sendiri (mandiri) dan atau bersama orang lain (kelompok) untuk memperoleh pendapatan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan diri dan keluarga mereka.

9. Sosial budaya. Sosial budaya adalah fenomena sosial dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu potensi daya dukung yang dapat dimanfaatkan dan atau dikembangkan dalam pembelajaran keterampilan masyarakat di desa pesisir. Sebagai potensi, sosial budaya dapat berupa sistem religi (agama), mata pencaharian, sistem teknologi dan pengetahuan, sistem organisasi sosial, bahasa dan seni. Potensi sosial budaya dalam penelitian adalah fenomena atau tradisi sebagai daya dukung yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai media maupun sumber belajar dalam memberdayakan keluarga petani desa pesisir melalui pelatihan keterampilan dengan beberapa langkah kegiatan, yaitu: (1) pengenalan, (2) proses pemberdayaan, (3) perencanaan, (4) pengorganisasian, (5) penggerakan, (6) pengawasan, (7) penilaian, (8) keputusan, dan (9) pengembangan. Jadi, pengembangan model pelatihan keterampilan terpadu dalam penelitian ini adalah upaya mengembangkan suatu acuan/pola kegiatan yang terencana untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maju/meningkat dari sebelumnya, baik kuantitas maupun kualitasnya.

G. Kerangka Pemikiran

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah upaya melakukan perubahan ke arah perbaikan, peningkatan, dan/atau pengembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, martabat, meningkatkan kesejahteraan dan taraf penghidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan dapat dipandang sebagai proses belajar.

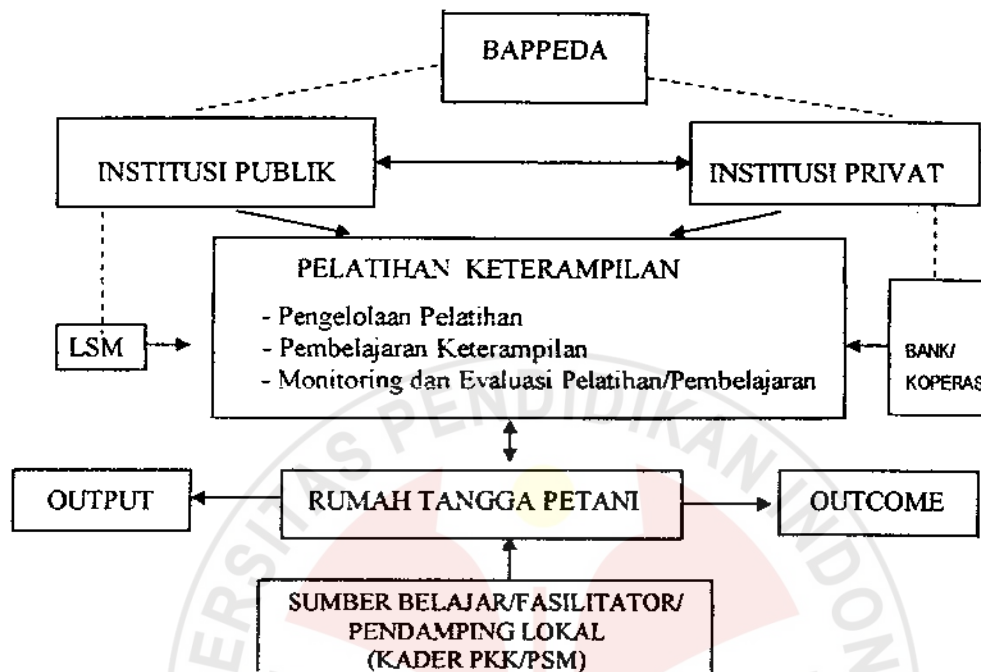
Berangkat dari pengalaman pembangunan masyarakat, khusus pembangunan di bidang pertanian di Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat petani, di antaranya adalah aspek sosial-ekonomi.

Dalam proses perubahan sosial-ekonomi di sektor pertanian tersebut tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Demikian halnya bagi sebagian besar masyarakat petani di pedesaan (desa pesisir) yang tidak dan atau kurang memiliki aset lahan pertanian dan modal (finansial, pengetahuan, dan keterampilan) serta tidak memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan dan pasar.

Pendidikan keterampilan adalah bagian dari pendidikan kejuruan, merupakan salah satu jenis pendidikan luar sekolah. Peluang PLS dalam pembangunan masyarakat pedesaan, salah satunya adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat petani dalam bentuk pelatihan keterampilan dengan pengembangan pendekatan partisipatif untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi ekonomi dan non-ekonomi di masyarakat untuk mendukung terwujudnya proses pembangunan secara terpadu (Sudjana, 2001: 107).

Pemberdayaan masyarakat di pedesaan (keluarga petani di desa pesisir) memerlukan perhatian dan pelibatan berbagai pihak dengan menerapkan prinsip keterpaduan (*integrated*) dan pendekatan partisipatif melalui penguatan sistem kerja sama kelembagaan, meliputi: lembaga pemerintah/instansi terkait (institusi publik) dan lembaga swasta (institusi privat) dan Lembaga Non-Pemerintah, lainnya seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat Desa, dan Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat dan sumber belajar lokal serta kelompok sasaran itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat petani tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan model pelatihan keterampilan terpadu dengan pendekatan pembelajaran partisipatif yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi pekerjaan non-pertanian di pedesaan (*the rural nonfarm income*). Sifat dasar berfungsinya lapangan kerja bukan pertanian pedesaan bagi petani di pedesaan

mengisyaratkan pentingnya keterkaitan yang kokoh antar berbagai sektor lapangan kerja non-pertanian pedesaan, seperti divisualisasikan dalam bentuk model sistem kerja sama dan penguatan kelembagaan, seperti gambar berikut:



Gambar 1.1: Model Pelatihan Keterampilan Terpadu dengan Pendekatan Partisipatif melalui Sistem Kerja Sama dan Penguatan Kelembagaan

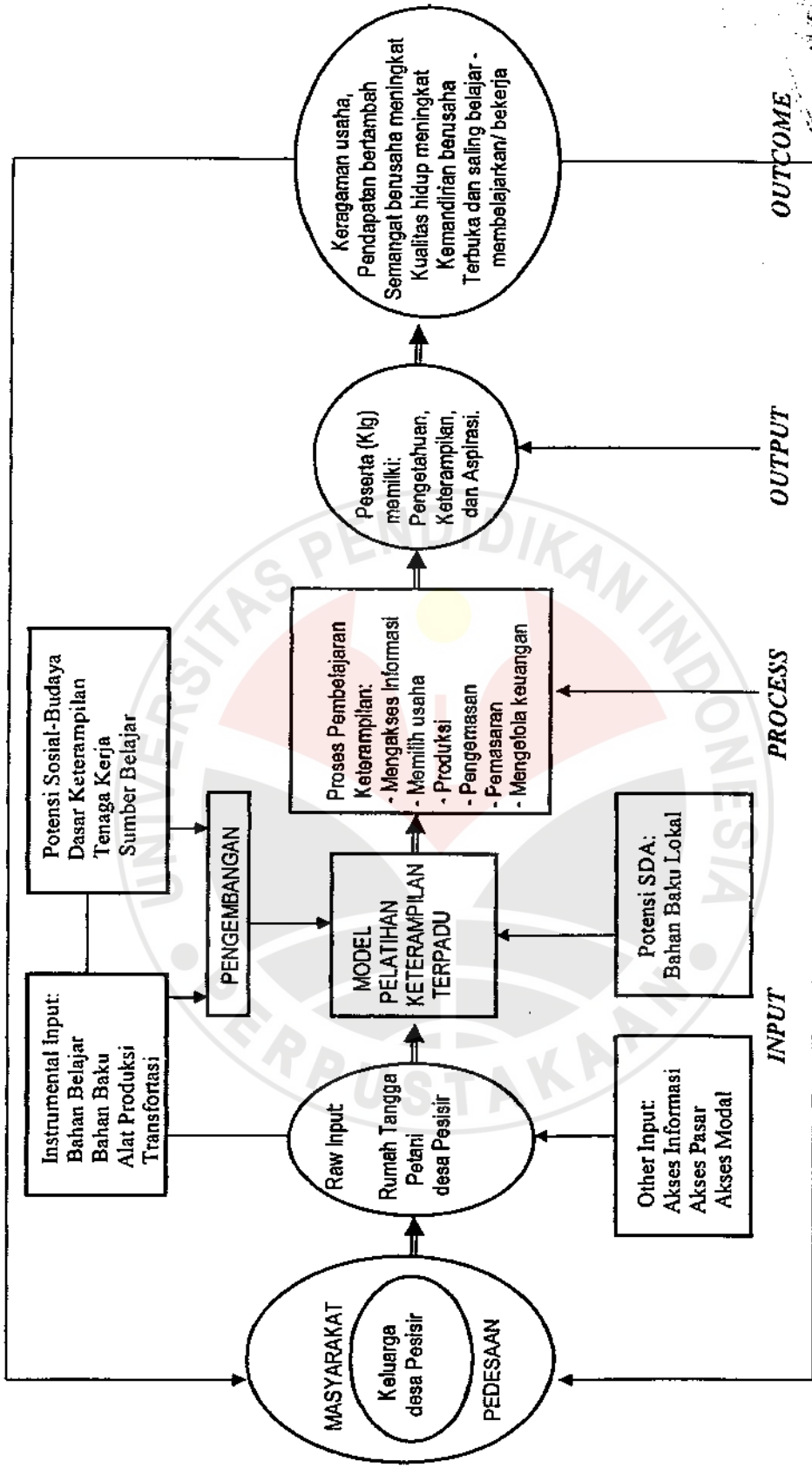
Adanya keterkaitan operasional berbagai institusi dan organisasi mengisyaratkan bahwa pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator dengan menciptakan keterkaitan di kalangan para mitra, bukan memisahkan dan mengunci mereka ke dalam “sektor-sektor” dan “departemen-departemen”.

Kebijakan pembangunan masyarakat petani di desa-desa pesisir harus dilihat dalam perspektif yang luas dan integratif dengan memperhatikan karakteristik struktur sosial, budaya, dan sumber daya ekonomi yang berbeda kondisinya. Pilihan rasional dan kontekstual yang bisa dikembangkan untuk kepentingan jangka panjang adalah melakukan diversifikasi pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan di kalangan keluarga petani serta anggota-anggota rumah tangganya, terutama di luar sektor pertanian (*non-farm sector*). Meskipun kebanyakan usaha rumah tangga (*home*

industry) menggunakan modal sendiri dan tidak memiliki izin usaha seperti usaha kecil, menengah, dan besar, namun pada sisi lain, usaha rumah tangga bisa dipandang sebagai “embrio” pertumbuhan ekonomi jika sektor ini menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan ekonomi rakyat.

Penelitian ini diawali dengan memahami kondisi kehidupan rumah tangga petani (lahan sempit, tuna lahan dan/atau buruh tani) yang pada umumnya mengerjakan lahan pertanian sistem tadah hujan biasa disebut ladang (*huma*). Pengembangan model pelatihan keterampilan terpadu dalam penelitian ini lebih menekankan pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan peluang pilihan berbagai mata pencaharian dan pendapatan rumah tangga. Mendorong munculnya kesadaran dan kemauan belajar yang bertujuan memperoleh dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap serta aspirasi diharapkan terciptanya masyarakat belajar. Untuk itu, diperlukan agen perubahan yang diharapkan mampu berperan sebagai motivator dan fasilitator dengan kelenturan berpikir, daya suai intelektual yang besar, dan keterbukaan serta mampu melakukan berbagai pendekatan sesuai dengan latar sosial-budaya masyarakat untuk membangun masa depan mereka atas pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, kultur, dan institusi mereka sendiri.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana model pelatihan keterampilan terpadu dapat memberdayakan keluarga petani desa pesisir dalam memperoleh keragaman pendapatan non-pertanian. Alur kegiatan penelitian dan pengembangan ini secara garis besarnya divisualisasikan seperti gambar pada halaman berikut:



Gambar 1.2.: Alur Pemikiran dalam Penelitian dan Pengembangan

Pada gambar 1.2 tersebut di atas, tampak bahwa lingkaran pertama menunjukkan bahwa masyarakat di pedesaan dan lingkaran di dalamnya terdapat keluarga petani di desa pesisir. Penelitian ini difokuskan pada keluarga (rumah tangga) petani yang berada di lingkaran kedua (*raw-input*), yaitu: petani tuna lahan, lahan sempit, dan buruh tani sebagai komponen utama sebagai sasaran program pembelajaran. Komponen lainnya, *instrumental-input* (bahan belajar, bahan baku lokal dan/atau dari luar, alat produksi serta transportasi); *other-input* (akses informasi, akses pasar, dan akses modal); *environment* terdiri atas lingkungan/potensi sosial-budaya (dasar keterampilan, tenaga kerja, sumber belajar); dan potensi daya alam (bahan baku hasil pertanian dan perkebunan). Kotak di tengah menunjukkan proses pembelajaran jenis-jenis keterampilan (pengetahuan dan keterampilan mengenai pasar dan pemasaran, permodalan, kewirausahaan, bahan tambahan makanan (BTM), analisis usaha dan pembukuan, produksi (*processing*), serta pengemasan (*packaging*) dan pelabelan (*labelling*).

Hasil pembelajaran keterampilan (*out-put*) berada pada lingkaran keempat yang diharapkan keluarga petani memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta aspirasi. Pada lingkaran terakhir terdapat *out-come*, yaitu terdapat keluarga (rumah tangga) petani memiliki keragaman sumber pendapatan, meningkatnya pendapatan, semangat berusaha, kualitas hidup, tumbuh kemandirian berusaha, terbuka dan saling belajar-membelajarkan/bekerja.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, diharapkan agar petani memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta aspirasi yang berdampak terhadap peningkatan perolehan pendapatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga petani desa pesisir di Kecamatan Sui. Kunyit Kabupaten Pontianak.